

DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU:

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Baku", 1998.
- Attamimi, A. Hamid S, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, tanpa penerbit, tanpa tahun.
- Bachtiar, Harsja W. *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Jakarta, Grasindo dan PTIK, 1994.
- Brotodiredjo, Soebroto, *Pengantar Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung , Yuhesa, 1997
- Cunliffe, Frederick dan Peter B. Piazza. *Criminalistic and Scientific Investigation*, Jakarta, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK, 1992.
- Djamin, Awaloedin. *Menuju POLRI Mandiri Yang Profesional Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat Cet. Ke-3*, Jakarta, PTIK Press, 2001.
- Effendi, H.A. Masyur. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Gauld, Carol C, *Demokrasi ditinjau kembali*, tanpa penerbit, 1993.

- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni, 1994.
- Hutagalung, H. Thoga, *Peran Hukum dan Keadilan dalam Pembangunan Masyarakat yang Sejahtera, bahan kuliah Filsafat Hukum, Bandung, Armico, 1990.*
- Ismail, Chaeruddin, *Polisi Yang Keder, Memformat Polisi Sipil Pada Masyarakat Demokratis*, Jakarta, Jakarta Citra, 2001.
- Kelana, Momo, *Memahami Undang-Undang Kepolisian (UU No.2 tahun 2002) Latar Belakang dan Komentar pasal demi pasal*, Jakarta, PTIK Press, 2002.
- Kunarto, *Hak Asasi Manusia (HAM) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI)*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997.
- _____. *Menyoroti RUU Kepolisian*, Jakarta, Bisnis Indonesia, 1997.
- _____. *Merenungi Kritik Terhadap POLRI Buku ke 1*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1995.
- Logemann, JHA, *Teori suatu Hukum Tata Negara Positif*, terjemahan Makkatutu dan J. S. Pangkarejo, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1975.
- Meliala, Adrianus. *Mengkritisi Polisi*, Jakarta, Kanisius, 2001.
- Muladi, HAM, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002.

- Patton, GW, A Text Book of Jurisprudence, tanpa penerbit, tanpa tahun.
- Prasetyo, Eko. *HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*, Yogyakarta, Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001.
- Rekodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan Buku Ke-2)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1997.
- . *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpuian Karangan Buku Ke-3)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1999.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpuian Karangan Buku Ke-4)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Rriminologi Universitas Indonesia), 1997.
- . *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ke-5)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1997.
- Roach, Kent, *Due Process and Victim's Right ; The New Law and Politic's of Criminal Justice*, London, University of Toronto Press, Toronto Buffalo, 1998.
- Koesparmono Irsan, *Pelindungan Korban Kejahatan Di tingkat Penyidikan* (Jakarta Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golkar

Pusat)

Sahetapi, JE, et al, *Bunga Rampai Viktimisasi*, tanpa alamat, PT. Eresko, 1995.

Sullivan, John.L. *Ilmu Kepolisian*, Jakarta, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK, 1992.

Tabah, Anton. *Polisi, Budaya dan Politik (Perenungan Diri, Usia Setengah Abad)*, Jawa Tengah, CV. Sahabat, 1996.

Wilson, DW dan RC. Me. Laren, *Police administration.*, New York, McGraw - Hill, 1977.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisaris Tinggi Untuk Hak Asasi Manusia. *Standar Hak Asasi Manusia Internasional Untuk Penegak Hukum*, Jakarta, Pusat Pengkajian Untuk Hak Asasi Manusia (LBH APIK), 1999.

Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, BPHN Depkeh dan Sinar Baru, Bandung.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soekamto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993
- Husin Kadri, dis kresi, *Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, Suatu Analisis Penegakkan Hukum Dalam Peradilan Pidana, Pidato Pengukuhan Guru Bes* ¹⁴² *Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung 18 Oktober 1999.
- Anonim, Almanak, *Seperempat Adat Kepolisian RI*, Mabes Polri Jakarta 1970
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta 1997
- Lubis Todung Mulya, *Penegakkan HAM Dalam Hukum Positif di Indonesia, Makalah Dalam Jurnal HAM Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Komnas HAM Bekerjasama dengan Gramedia, Jakarta 1997.
- Irianto, Bibit Samad, *Pemikiran menuju Polri yang Profesional, mandiri, berwibawa dan dicintai rakyat*, Jakarta 2006
- Abdussalam, R, *Penegakan hukum di lapangan* , Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997
- Reksodiputro, Marjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistim Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum dan Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta, 1994
- Seno Aji, Indiyanto, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Loebby Loqman, *HAM dan Demokratisasi ; Mertas Halan Menuju*

Indonesia Baru, Bahan Kuliah Pada Program PascaSarjana
Universitas Sriwijaya, Palembang, 21 Februari 2000

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) 1999, UU RI No. 39 Tahun 1999.

Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981.

RUU KUHP, Direktorat Perundang-undangan, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan, 1999.

Juklak Perundang-undangan dan Juknis tentang proses penyidikan tindak pidana.

JURNAL HUKUM, MASS MEDIA, DAN INTERNET

Echols, Jhon M, dan Hasan Sadikin, Kamus Inggris - Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1981.

ICW, YLBHI dan Program Pidana Fakultas Hukum - Universitas Indonesia, Riset Perancangan UU Perlindungan Saksi, Laporan penelitian disampaikan pada workshop Perancangan UU Perlindungan Saksi, Jakarta, Hotel Acacia, 2000.

Integrated Prosecution Justice System, *Suatu Tinjauan Terhadap*

Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, <http://www.antikorupsi.org/newsart/integratedprosecution.htm>. 17-02-2003 Internet.

Jawa Pos, 27 Juli 1992.

Jurnal Polisi Indonesia, Jakarta, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Tahun Ke-2, 2000.

Jurnal Hukum (Ius Quia Ius Turn), *Reformasi Hukum Pidana*, Nomor 11, Vol.6, 1999. ibaga P 144 Penyuluhan Hukum Golkar, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta, Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golkar Pusat, 1994.

Mabes POLRI, PTIK. *Buku Pedoman Pelatihan Keterampilan Fungsi Teknis Operasional Kepolisian Bagi First Line Supervisor*, Jakarta, 1994.

Radjab, Untung S., *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Bandung, Program Pascasarjana UNPAD, 2002.

Salim Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Jakarta, Modern English Press, 1991.

Sitompul DPM. *Kewenangan-Kewenangan Dasar Penegak Hukum Dalam Menggunakan Kekerasan dan Senjata Api*, Makalah Pengarahan Pada Mahasiswa PTIK, 2002.

Tim Cides. *Menegakkan HAM Dalam Era Demokrasi*,

[http://wvyw.cides.or.id/publikasi/ki0002101 .asp](http://wvyw.cides.or.id/publikasi/ki0002101.asp). 17-02-2003.

Universal Declaration of Human Rights, dalam Human Rights ;a
Compilation of International Instruments,(United Nations
Publications, Sales No. E. 88. XIV. 1).

INTERNET

Informasi Lengkap mengenai isi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat
dilihat di alamat website : [http://www.indonesia.go.id/produk
uu/isi/pp2002/pp-2'02.htm](http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2002/pp-2'02.htm)

Informasi Lengkap mengenai isi dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat
dilihat di alamat website : [http://www.ri.go.id/produk
uu/isi/pp2002/pp-3'02.htm](http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/pp2002/pp-3'02.htm)

